UPAYA HUKUM VERZET DALAM SENGKETA PERDATA

Geby Septia Handayani¹, Ilham Kurniawan Syahputra², Hafiza Putri Cahyani³,
Wahyu Setiawan⁴, Iqbal Hardiansyah⁵, Fauziah Lubis⁶, Husni Fatimah⁷

gebyseptia05@gmail.com¹, ilhamkurniawansyahputra@gmail.com²,

hafizaputri143@gmail.com³, wahyurayganteng01@gmail.com⁴,

iqbalhardiansyah465@gmail.com⁵, fauziah@uinsu.ac.id⁶, husnif750@gmail.com⁷

Universitas Negeri Islam Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, prosedur pelaksanaan, serta implikasi yuridis dari upaya hukum verzet sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan verstek dalam perkara perdata. Permasalahan utama yang dikaji adalah efektivitas verzet dalam menjamin hak tergugat, khususnya dalam perkara perceraian, di mana tergugat tidak hadir di persidangan. Latar belakang kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa dalam proses perceraian, sering terjadi ketidakhadiran salah satu pihak umumnya suami yang kemudian menyebabkan dijatuhkannya putusan verstek oleh hakim. Kondisi ini berpotensi merugikan tergugat yang mungkin tidak mengetahui proses persidangan, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang adil untuk memulihkan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, mengkaji regulasi seperti HIR, RBg, dan PERMA No. 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PERMA No. 7 Tahun 2022. Data diperoleh dari literatur hukum dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa verzet berfungsi sebagai instrumen penting dalam sistem peradilan perdata untuk menjamin hak tergugat agar dapat membela diri setelah dijatuhkannya putusan verstek. Dalam konteks perceraian, verzet memberi ruang bagi tergugat untuk meminta pemeriksaan ulang perkara. Selain itu, implementasi verzet secara elektronik melalui e-court mencerminkan kemajuan teknologi hukum, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal aksesibilitas dan pemahaman publik.

Kata Kunci: Verzet, Upaya Hukum, Sengketa Perdata.

ABSTRACT

This study aims to examine the legal basis, procedural mechanisms, and juridical implications of verzet as a legal remedy against verstek decisions in Indonesian civil litigation. The main issue addressed is the effectiveness of verzet in safeguarding the rights of defendants particularly in divorce cases where the defendant fails to appear in court. The background of this research highlights the frequent occurrence in divorce proceedings where one party, often the husband, is absent during trial, leading to a verstek verdict. Such situations may disadvantage the absent party, especially if they were unaware of the trial process, thereby necessitating a legal mechanism to ensure procedural fairness. This research employs a normative juridical method with a descriptive-qualitative approach, analyzing primary legal sources such as the HIR, RBg, and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2019 as amended by PERMA No. 7 of 2022. Secondary data is gathered from academic literature and legal commentaries. The findings reveal that verzet serves as a crucial legal instrument within civil proceedings to uphold the defendant's right to be heard and to request a re-examination of the case after a verstek ruling. In the context of divorce, verzet allows the absent party to contest the decision and present their defense. Furthermore, the implementation of verzet through the e-court system signifies progress in judicial modernization, although challenges remain in terms of public awareness and digital accessibility.

Keywords: Verzet, Legal Remedies, Civil Dispute.

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, upaya hukum memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang bersengketa. Proses peradilan tidak hanya

berhenti pada putusan pengadilan tingkat pertama, melainkan terbuka kemungkinan bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan tersebut untuk menempuh jalur hukum lanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang menghendaki agar setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mempertahankan haknya secara adil dan proporsional melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Upaya hukum dalam perkara perdata terbagi ke dalam dua jenis, yakni upaya hukum biasa (*ordinary legal remedies*) dan upaya hukum luar biasa (*extraordinary legal remedies*). Upaya hukum biasa mencakup *verzet* dan banding, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi kasasi dan peninjauan kembali (PK). Masing-masing upaya hukum ini memiliki dasar hukum, prosedur, jangka waktu, serta syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dapat diajukan secara sah menurut hukum.

Verzet adalah bentuk upaya hukum yang dilakukan untuk menentang putusan *verstek*, yaitu putusan pengadilan yang dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Melalui *verzet*, tergugat dapat memohon pemeriksaan ulang atas perkara tersebut oleh pengadilan yang sama yang telah menjatuhkan putusan *verstek*, dengan harapan dapat memberikan pembelaan yang belum sempat disampaikan sebelumnya.

Dalam pandangan hukum, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk ikatan lahir dan batin yang bersifat abadi. Namun, dalam kenyataannya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan nilai-nilai luhur tersebut. Dalam menjalani pernikahan, suami dan istri kerap menghadapi berbagai persoalan yang menguji keharmonisan hubungan mereka. Dalam beberapa kasus, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, sehingga berujung pada keputusan yang sulit, yaitu perceraian. Situasi ini menunjukkan bahwa institusi perkawinan memiliki dinamika yang rumit dan terkadang menuntut keputusan berat demi kebaikan dan kebahagiaan bersama.

Secara hukum, perceraian diakui sebagai salah satu penyebab berakhirnya ikatan pernikahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 39 menyatakan bahwa proses perceraian wajib diajukan ke pengadilan, dengan ketentuan bahwa sebelumnya pengadilan harus memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk melakukan upaya perdamaian. Ketentuan ini juga bertujuan untuk menekan laju perceraian. Namun, dalam praktiknya, ada kasus di mana salah satu pasangan sengaja menciptakan alasan agar dapat segera mengakhiri pernikahan, yang menunjukkan betapa rumitnya penerapan hukum dalam persoalan perkawinan.

Dalam peraturan mengenai perkawinan, alasan-alasan yang dianggap sah untuk mengajukan perceraian telah diatur secara rinci dalam Penjelasan Umum Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta diperkuat oleh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Beberapa keadaan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai mencakup tindakan salah satu pasangan yang melakukan perzinahan, memiliki kecanduan terhadap alkohol, narkoba, perjudian, atau perilaku merusak lainnya yang sulit disembuhkan. Perceraian juga dapat diajukan apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan atau tanpa izin. Selain itu, keterlibatan dalam tindak pidana berat setelah menikah juga dapat dijadikan alasan. Faktor-faktor lainnya meliputi adanya kekerasan dalam rumah tangga, kondisi cacat atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan peran sebagai suami atau istri, pertengkaran yang berkepanjangan tanpa adanya harapan untuk rujuk, serta alasan keagamaan seperti murtad atau pelanggaran terhadap taklik talak. Ketentuan-ketentuan ini disusun untuk memberikan dasar hukum yang kuat, sejalan dengan norma-norma yang berlaku, dalam memutuskan berakhirnya suatu pernikahan, dengan

mempertimbangkan beragam situasi kompleks yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, putusan verstek menjadi solusi penting ketika seorang istri menghadapi konflik berkepanjangan dan ketidakharmonisan dalam pernikahannya. Ketika hubungan suami-istri tidak lagi mencerminkan kehidupan yang rukun dan penuh kasih sayang, sering kali perceraian menjadi jalan yang dipilih. Untuk memperoleh pengakuan hukum atas perceraian tersebut, salah satu pihak harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Jika dalam proses persidangan suami tidak hadir, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan verstek. Keputusan ini memiliki peran penting karena sifatnya yang mendesak dan memberikan perlindungan bagi istri yang ditinggalkan tanpa kejelasan, baik secara emosional maupun ekonomi, sehingga memberikan kepastian hukum serta menjamin hak dan kesejahteraan pihak yang ditinggalkan dalam situasi sulit.

Hukum berperan sebagai pedoman normatif yang mengarahkan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Baik dalam bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis, hukum menjadi dasar terciptanya keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat mengenai tata cara dalam menjalani proses hukum, khususnya mengenai kewajiban untuk hadir apabila mendapat panggilan dari pengadilan. Hal ini terutama berlaku bagi pihak yang berstatus sebagai tergugat, yang seharusnya menghormati dan memenuhi panggilan hakim. Kesadaran tentang akibat hukum dari ketidakhadiran dalam persidangan sangatlah penting, karena perkara bisa saja diputus tanpa kehadiran tergugat, yang pada akhirnya dapat merugikan dirinya sendiri. Meskipun demikian, sistem hukum tetap memberikan keseimbangan dengan menyediakan hak bagi tergugat untuk mengajukan verzet, yaitu suatu upaya hukum guna mempertahankan hak-haknya. Mekanisme ini menunjukkan adanya perlindungan dan ruang keadilan bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menelaah dan memahami hukum sebagai norma yang hidup dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini memfokuskan kajian pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai upaya hukum verzet terhadap putusan verstek dalam perkara perdata, baik dari aspek teoritis maupun praktik yuridisnya. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primer seperti *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Reglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang menjadi landasan hukum utama dalam pengajuan verzet. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, serta literatur lain yang mendukung kajian ini, guna memperkuat argumentasi serta memberikan sudut pandang akademik yang komprehensif.

Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, dengan maksud untuk memaparkan secara sistematis dasar hukum, prosedur, serta implikasi yuridis dari pelaksanaan verzet, termasuk relevansinya dalam penerapan sistem peradilan elektronik (e-court) di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menjelaskan bagaimana verzet tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap hak asasi tergugat, sejalan dengan asas *audi et alteram partem* dalam prinsip peradilan yang adil dan setara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Verzet

Ketika suatu perkara telah sampai pada tahap di mana putusan verstek dijatuhkan, pihak tergugat atau termohon memiliki hak untuk menempuh jalur hukum lanjutan dengan mengajukan verzet atau perlawanan terhadap putusan tersebut. Apabila langkah ini diambil, maka proses peradilan akan berlanjut dengan dilakukannya persidangan ulang serta pemanggilan ulang semua pihak yang terkait. Melalui mekanisme ini, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi, menambahkan argumen, serta memperoleh keadilan yang lebih utuh dalam penyelesaian perkara.

Perlawanan atau verzet sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 HIR serta Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 RBg, merupakan upaya hukum khusus yang dapat diajukan oleh tergugat terhadap putusan yang dijatuhkan tanpa kehadirannya dalam proses persidangan. Prinsip dasarnya adalah bahwa verzet disediakan sebagai hak eksklusif bagi tergugat yang dijatuhi putusan verstek. Sementara itu, apabila pihak penggugat yang merasa dirugikan oleh putusan verstek, Oleh karena itu, langkah yang bisa diambil adalah mengajukan banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 dan Pasal 200 RBg. Pemahaman terhadap perbedaan mekanisme ini sangat penting agar para pihak memahami pilihan hukum yang tersedia setelah dijatuhkannya putusan verstek.

Dalam ketentuan HIR Pasal 125 ditegaskan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan atas putusan verstek. Namun, jika pihak penggugat terlebih dahulu mengajukan banding, maka hak tergugat untuk mengajukan verzet akan gugur. Meskipun demikian, tergugat tetap memiliki alternatif untuk mengajukan banding sebagai respons terhadap putusan tersebut. Ketentuan ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai skema upaya hukum yang dapat digunakan tergugat dalam menghadapi putusan verstek.

Dalam hal ini, hak tergugat untuk mengajukan verzet akan hilang apabila setelah putusan verstek dibacakan, ia memilih untuk menempuh upaya hukum berupa banding. Namun, apabila kemudian penggugat memutuskan untuk mencabut permohonan banding yang diajukannya, maka tergugat memperoleh kembali haknya untuk mengajukan banding. Sebaliknya, apabila tergugat tidak ikut serta dalam proses banding dan penggugat mencabut permohonannya, maka putusan verstek tersebut akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Situasi ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pilihan hukum yang diambil oleh masing-masing pihak pasca-putusan verstek dengan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai dinamika prosedural setelah putusan verstek dikeluarkan.

Dasar hukum terkait verzet tercantum dalam Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg, yang memberikan hak kepada tergugat atau para tergugat yang dijatuhi putusan secara verstek untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, baik perkara verstek maupun verzet dicatat dengan satu nomor perkara yang sama, agar tetap ditangani oleh majelis hakim yang sebelumnya telah memutus perkara tersebut. Dalam proses ini, hakim diharapkan melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap pokok gugatan yang sebelumnya telah diputus secara verstek. Penjelasan ini menggambarkan kerangka hukum dan alur prosedural yang mengatur pelaksanaan verzet dalam konteks hukum acara perdata ketika tergugat dikenai putusan secara verstek.

Perlawanan verzet adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tanpa kehadiran pihak tergugat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, pengajuan verzet terhadap putusan verstek yang disampaikan secara elektronik wajib dilakukan melalui sistem elektronik.

Upaya hukum verzet diajukan secara elektronik melalui meja e-court. selanjutnya melawan mendapatkan akses terhadap perkara tersebut baik sebagai pengguna terdaftar dalam hal melawan didampingi oleh advokat maupun sebagai pengguna lain dalam hal melawan bertindak in person.

Pendaftaran perkara perlawanan yang dilakukan secara elektronik tidak dikenakan biaya pendaftaran maupun biaya pemanggilan para pihak, karena seluruh proses pemanggilan terkait perlawanan dilakukan secara elektronik. Dalam hal tergugat mengajukan verzet dan penggugat mengajukan banding maka berdasarkan ketentuan pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 banding yang diajukan oleh penggugat dinyatakan gugur.

Apabila berkas perkara banding belum dikirim oleh pengadilan pengaju ke pengadilan tinggi maka yang banding yang diajukan oleh penggugat gugur dinyatakan gugur dengan cara Panitera mengeluarkan surat keterangan bahwa tergugat mengajukan verzet kemudian berdasarkan surat keterangan tersebut ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang menyatakan Banding yang diajukan penggugat gugur, kemudian penetapan tersebut diberitahukan kepada para pihak secara elektronik.

Jika berkas perkara telah dikirim ke pengadilan tinggi maka surat keterangan Panitera yang menerangkan tergugat mengajukan verzet dikirim secara elektronik ke pengadilan tinggi, kemudian berdasarkan surat keterangan tersebut majelis hakim di pengadilan tinggi menjatuhkan putusan yang menyatakan bnding penggugat gugur selanjutnya salinan putusan tersebut dikirimkan oleh Panitera pengadilan secara elektronik ke pengadilan Pengaju dan oleh Pengadilan pengaju diberitahukan secara elektronik kepada para pihak.

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan atau verzet jika putusan verstek kepada ketua pengadilan negeri atau pengadilan agama atau Mahkamah Syariah di mana perkara tersebut diputus.

Pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan secara elektronik dapat menempuh upaya hukum secara elektronik pula, dengan cara menandatangani akta pernyataan keberatan yang disediakan oleh kepaniteraan di hadapan panitera, disertai dengan alasan-alasan keberatannya.

Pengajuan upaya hukum serta seluruh tahapan pemberkasan perkara dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi yang dimiliki oleh pengadilan. Pembayaran biaya upaya hukum dan penyampaian dokumen elektronik dibebankan kepada pemohon keberatan.

Biaya yang wajib dibayarkan oleh pemohon yang mengajukan upaya hukum tersebut setara dengan biaya pengajuan upaya hukum konvensional melalui aplikasi e-Litigation, sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA No. 7 Tahun 2022 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 363/KMA/SK/XII/2022.

Setelah menerima permohonan upaya hukum keberatan atau verzet beserta alasan-alasannya yang dikirim secara elektronik oleh pengguna terdaftar atau pengguna lainnya, serta setelah biaya upaya hukum tersebut dibayarkan, Panitera pengadilan yang bersangkutan wajib menerbitkan akta pernyataan upaya hukum keberatan secara elektronik. Sementara itu, dalam hal verzet, permohonan dari pihak pelawan dianggap sebagai jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Seluruh dokumen yang berkaitan dengan upaya hukum wajib disusun dalam format PDF dan RTF/DOC. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Ketua atau Kepala Pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan serta pengawasan terhadap proses pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Permohonan keberatan harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja

terhitung sejak putusan dibacakan atau sejak tanggal diterimanya pemberitahuan putusan. Jika jangka waktu tersebut terlewat, Ketua Pengadilan akan menyatakan keberatan tidak dapat diterima, berdasarkan surat keterangan dari panitera yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan telah melampaui batas waktu yang ditentukan.

Prinsip Audi et Alteram Partem

Asas ini menegaskan pentingnya perlakuan yang setara bagi semua pihak yang berperkara, tanpa adanya pembedaan atau pengesampingan salah satu pihak. Kedua belah pihak harus diperlakukan secara adil dan seimbang, dengan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan perkara. Setiap pihak berhak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan penerapan asas audi et alteram partem, yaitu prinsip bahwa pengadilan harus mengadili secara adil tanpa membedakan siapa pun. Hakim tidak boleh menerima keterangan dari satu pihak saja sebagai kebenaran apabila pihak lain belum didengar atau tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan harus dievaluasi alasannya terlebih dahulu. Jika ketidakhadiran tersebut dapat dibenarkan, maka tergugat seharusnya dipanggil kembali dan perkara tidak langsung diputus.

Asas audi et alteram partem merupakan salah satu asas fundamental dalam prinsip due process of law yang berasal dari tradisi hukum Anglo-Saxon dan diadopsi secara luas dalam sistem hukum modern, termasuk Indonesia. Asas ini memiliki arti "dengarlah juga pihak yang lain", yang menegaskan bahwa dalam setiap proses peradilan, baik dalam perkara perdata maupun pidana, kedua belah pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat, membela diri, dan mengajukan bukti sebelum hakim menjatuhkan putusan. Asas ini menjadi fondasi utama bagi sistem peradilan yang adil dan imparial (fair and impartial trial), dan pelanggaran terhadap asas ini dapat menyebabkan proses hukum dianggap cacat secara prosedural.

Dalam praktik peradilan, terdapat kondisi di mana salah satu pihak, terutama tergugat atau terdakwa, tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dalam situasi demikian, pengadilan berwenang menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak tersebut, yang disebut sebagai putusan verstek. Putusan verstek ini dijatuhkan secara sepihak, tanpa mendengarkan keterangan atau pembelaan dari pihak yang tidak hadir. Secara konseptual, hal ini berpotensi bertentangan dengan asas audi et alteram partem, karena pihak yang tidak hadir belum diberi kesempatan secara nyata untuk membela diri di hadapan pengadilan.

Untuk mengatasi potensi ketimpangan tersebut, hukum acara menyediakan mekanisme upaya hukum yang disebut dengan verzet. Verzet adalah bentuk perlawanan hukum yang diajukan oleh pihak yang dikenai putusan verstek, baik dalam perkara perdata maupun pidana ringan, dalam jangka waktu tertentu setelah pemberitahuan putusan tersebut. Melalui pengajuan verzet, pihak yang sebelumnya tidak hadir diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan ketidakhadirannya dan membela diri terhadap pokok perkara yang diputuskan. Dalam perkara perdata, dasar hukum mengenai verzet diatur dalam Herzienne Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 129 dan seterusnya, sedangkan dalam perkara pidana ringan, diatur dalam KUHAP Pasal 214 hingga Pasal 218.

Implikasi Upaya Hukum Verzet

Upaya hukum verzet adalah salah satu instrumen dalam sistem hukum acara yang secara fungsional berperan sebagai mekanisme korektif terhadap putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam keadaan tergugat atau terdakwa tidak hadir

tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara patut. Dalam konteks asas *due process of law* dan *fair trial*, verzet memiliki kedudukan yang sangat penting, karena menjadi jalan masuk bagi pihak yang semula tidak mendapat kesempatan membela diri untuk memperoleh kembali haknya untuk didengar. Oleh karena itu, verzet bukan hanya sekadar prosedur teknis, melainkan mengandung implikasi yuridis, prosedural, dan substantif yang signifikan terhadap jalannya proses peradilan dan perlindungan hak asasi para pihak.

Secara normatif, verzet diatur dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia. Dalam perkara perdata, dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 125–129 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang mengatur bahwa tergugat yang dijatuhi putusan verstek dapat mengajukan perlawanan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan secara resmi. Dalam hukum acara pidana, terutama untuk tindak pidana ringan, mekanisme verzet diatur dalam Pasal 214–218 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam kedua bidang hukum ini, verzet bertujuan untuk memberi akses kepada pihak yang sebelumnya tidak hadir agar perkara dapat diperiksa kembali secara menyeluruh, dengan prinsip *adversarial*, di mana kedua pihak hadir dan diberikan kesempatan yang seimbang.

Implikasi hukum dari pengajuan verzet adalah bahwa putusan verstek kehilangan kekuatan eksekutorialnya untuk sementara waktu. Perkara secara otomatis dibuka kembali, dan pengadilan wajib memeriksa ulang seluruh pokok perkara sebagaimana seharusnya dalam sidang biasa. Dalam konteks ini, verzet berfungsi mengembalikan posisi hukum para pihak ke titik awal sebelum verstek dijatuhkan. Dengan demikian, verzet berperan sebagai perwujudan konkret dari asas *audi et alteram partem*—bahwa tidak seorang pun boleh dijatuhi putusan tanpa diberikan hak untuk membela diri dan menyampaikan argumen.

Di sisi lain, terdapat pula implikasi substantif yang tidak kalah penting. Pengajuan verzet membuka ruang untuk kemungkinan perubahan atau bahkan pembatalan total terhadap putusan verstek. Jika dalam proses verzet ternyata terbukti bahwa pihak yang tidak hadir sebelumnya memiliki dalil-dalil hukum dan fakta yang kuat, maka hakim dapat mengoreksi putusan awal dan menjatuhkan putusan yang lebih adil dan proporsional. Hal ini memberi jaminan perlindungan terhadap potensi ketidakadilan, baik karena ketidakhadiran yang tidak disengaja, kekeliruan administratif, maupun keterbatasan akses terhadap proses peradilan.

Dari perspektif praktik peradilan, implikasi verzet juga bersinggungan dengan isu-isu seperti akses terhadap keadilan (*access to justice*), efisiensi pengelolaan perkara, dan integritas sistem hukum secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, pihak yang tidak hadir bukan semata-mata karena lalai atau menghindari, melainkan karena hambatan struktural seperti ketidaktahuan hukum, lokasi geografis yang sulit dijangkau, atau bahkan ketidaksempurnaan dalam proses pemanggilan. Oleh karena itu, verzet menjadi jembatan penting yang menjamin bahwa hak asasi untuk diadili secara adil tetap terjaga, meskipun dalam kondisi ketidakhadiran sementara.

Kesimpulannya, implikasi upaya hukum verzet sangat luas dan multidimensional. Di satu sisi, ia memastikan terciptanya *due process* yang menjamin hak untuk didengar bagi semua pihak, dan di sisi lain, ia menuntut kesiapan sistem peradilan untuk memberikan ruang koreksi terhadap putusan yang belum menggambarkan keadilan secara utuh. Dalam konteks reformasi peradilan dan penguatan perlindungan hak asasi, verzet harus terus dipertahankan dan diperkuat sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip keadilan yang partisipatif dan inklusif.

Perbandingan Upaya Hukum Verzet dengan Upaya Hukum lainnya

Dalam sistem peradilan Indonesia, upaya hukum verzet memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan dengan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). Verzet merupakan bentuk perlawanan terhadap putusan verstek,

yakni putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat atau terdakwa meskipun telah dipanggil secara sah. Tujuan utama dari verzet adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak hadir untuk membela diri, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat diulang dari awal seolah-olah belum pernah ada putusan. Hal ini berbeda dengan banding, yang merupakan kelanjutan dari proses peradilan biasa dan bertujuan untuk mengoreksi putusan tingkat pertama baik dari segi fakta maupun penerapan hukumnya. Sementara itu, kasasi hanya memeriksa aspek penerapan hukum dari putusan banding tanpa membuka kembali fakta-fakta perkara, dan PK merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan syarat adanya keadaan baru (*novum*) atau kekeliruan nyata dari hakim.

Dari segi tenggat waktu, verzet memiliki jangka waktu pengajuan yang cukup singkat, yaitu 14 hari sejak diberitahukannya putusan verstek kepada pihak yang bersangkutan. Banding dan kasasi juga memiliki tenggat waktu yang serupa, namun PK tidak dibatasi secara ketat oleh waktu selama syaratnya terpenuhi. Perbedaan penting lainnya terletak pada fungsi dan ruang lingkup pemeriksaan. Verzet membuka kembali seluruh proses pemeriksaan perkara karena menyangkut hak dasar untuk didengar, sedangkan banding dan kasasi melanjutkan proses berdasarkan rekam jejak persidangan sebelumnya. Oleh karena itu, verzet tidak hanya bersifat korektif secara prosedural, tetapi juga menjadi manifestasi dari prinsip keadilan formal dan substansial, terutama dalam menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang adil dalam membela diri di pengadilan.

KESIMPULAN

Upaya hukum verzet merupakan mekanisme penting dalam sistem peradilan perdata Indonesia yang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membela diri terhadap putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadirannya. Verzet berfungsi tidak hanya sebagai upaya korektif terhadap kekeliruan prosedural, tetapi juga sebagai perwujudan asas *audi et alteram partem* yang menjamin keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan adanya verzet, pihak tergugat dapat meminta pengadilan untuk memeriksa ulang perkara secara menyeluruh. Implikasi hukumnya sangat signifikan karena verzet dapat menghentikan kekuatan eksekutorial putusan verstek dan membuka peluang terciptanya putusan baru yang lebih adil. Selain itu, perkembangan implementasi verzet secara elektronik melalui sistem e-court juga mencerminkan adaptasi sistem hukum terhadap teknologi modern demi efisiensi dan transparansi peradilan.

Saran

Dalam rangka mengoptimalkan peran verzet sebagai instrumen perlindungan hak asasi dalam sistem hukum acara perdata, beberapa hal perlu menjadi perhatian. Pertama, pemerintah dan lembaga peradilan perlu melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai hak dan prosedur pengajuan verzet, sehingga setiap warga negara memahami cara menggunakan hak hukumnya secara tepat. Kedua, aparat peradilan perlu ditingkatkan kompetensinya, khususnya dalam penerapan e-litigasi agar proses hukum berjalan adil, cepat, dan profesional. Ketiga, administrasi pemanggilan tergugat harus diperbaiki dan diawasi secara ketat agar tidak terjadi putusan verstek akibat kelalaian administratif. Terakhir, sistem e-court perlu terus dievaluasi dan dikembangkan agar dapat diakses secara merata, termasuk oleh masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital, sehingga asas keadilan tetap terwujud dalam setiap proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Syarifuddin. M. *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. KENCANA. Jakarta. 2024.
- Andra, S., Lubis, F. (2024). Upaya Hukum Derden Verzet Terhadap Sita Eksekusi Perspektif Hukum Acara Keluarga. *Jurnal Hukum Modern*.
- Baihaqi, R., Dihati, H., Lubis, F., Negeri, U. I., Utara, S., William, J., & Serdang, K. D. (2023). Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. *Journal on Education*, 5(02), 3958-3969.
- Hakim, M. A., & Fauziah, N. (2024). Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek. *JURNAL STAIZA*, 2(1 Mei), 10-22.
- Ristanto, A. Y., Renggong, R., & Oner, B. (2024). Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Pasca Perma Nomor 7 Tahun 2022. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), 213-216.
- Rusydi, B. A. (2020). Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung. *Muslim Heritage*, 5(2), 393-393.
- Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). *Hikmah*, 15(1), 63-71.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022a). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022b). Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.